



**LAPORAN KEBERLANJUTAN
(SUSTAINABILITY REPORT)**

PT BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA

2025

DAFTAR ISI

A.	PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN	3
B.	IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)	4
C.	PROFIL SINGKAT BPR	4
D.	PENJELASAN DIREKSI	8
E.	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN	11
F.	KINERJA KEBERLANJUTAN	17
G.	VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN	20
H.	LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA	20
I.	TANGGAPAN LJK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA.....	20

A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan BPR dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

BPR mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegakkan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat

B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

1. Aspek Ekonomi (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025
1	Total Aset	26.156.796.464	24.286.480.444	25.198.752.280
2	Total Laba	33.228.178	57.940.849	6.818.195
3	Total KYD	17.625.129.367	18.404.469.228	21.974.236.134
4	Total Kredit Usaha Keberlanjutan	14.711.447.102	15.056.125.430	16.473.562.696

2. Aspek Lingkungan Hidup

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknolog informasi	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR
2.	Program Literasi Keuangan Berkelanjutan	Memberikan Program Literasi Keuangan Bank untuk para UMKM	Masyarakat Umum

3. Aspek Sosial

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan secara berkala kepada para karyawan sepanjang tahun	Seluruh Jenjang Organisasi BPR

Selama periode laporan, BPR belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perusahaan belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif

C. PROFIL SINGKAT BPR

1. Visi dan Misi Keberlanjutan

a. Visi Berkelanjutan

Terwujudnya Industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menjadi ujung tombak layanan jasa perbankan bagi masyarakat dan Pelaku UMKM.

b. Misi Berkelanjutan

1. Meningkatkan Pengelolaan BPR berdasarkan Tata Kelola BPR yang berbasis Manajemen Risiko sesuai POJK no. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan untuk menuju BPR yang pengelolaannya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015

2. Memberi layanan perbankan kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan cepat,

aman dan amanah

3. Melakukan pengembangan kualitas SDM, mensejahterkan karyawan, dan keuntungan pemegang saham
 4. Menciptakan Kondisi yang Kondusif untuk Mendorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BPR kepda UKM dan Mssyarakat Sekitar
 5. Meningkatkan Kebermanfaatan BPR Untuk Lingkungan Hidup Di sekitarnya
2. Nama, alamat, nomor telepon BPR serta Kantor Cabang (*Form 00.04 Data Kantor BPR*)

Sandi	Nama	Status	Alamat	No. Telpn
01	BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA	KANTOR PUSAT	JL. HOS COKROAMINOTO NO 88 PARE KEDIRI	0354-391887
02	BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA	KANTOR CABANG	JL.KH WACHIDHASYIMNO.8 5 JOMBANG	0321-862527

3. Skala Usaha BPR

a. Total Aset dan Total Kewajiban (*Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan*)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset	25.198.752.280
2	Total Kewajiban	17.710.630.214
3	Total Ekuitas	7.488.122.066

b. Jumlah Karyawan

1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2025
1	Laki-laki	21
2	Perempuan	13
	Total	34

2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2025
1	Dewan Komisaris	1
2	Direksi	1
3	Pejabat Eksekutif	3
4	Pegawai Staf	24
5	Pegawai Dasar	5
	Total	34

3. Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Usia Karyawan	31 Dese 2025
1	< 25	4
2	>25 - 35	15
3	>35 - 45	7
4	>45 - 55	6

LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) 2025

5	>55	7
	Total	64

4. Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	31 Des 2025
1	Pegawai Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	0
	- Sarjana Strata 2 (S2)	0
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 2 (D2)	0
	- Diploma 1 (D1)	0
	- SLTA	8
	- Lainnya	0
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	0
	- Sarjana Strata 2 (S2)	1
	- Sarjana Strata 1 (S1)	9
	- Diploma 3 (D3)	0
	- SLTA	10
	- Lainnya	0
	Total	34

5. Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

No.	Status	31 Des 2025
1	Pegawai Tetap	
	- Pemasaran	5
	- Pelayanan	9
	- Lainnya	0
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Pemasaran	8
	- Pelayanan	10
	- Lainnya	2
	Total	34

c. Persentase kepemilikan saham (Form 00.01 Data Kepemilikan BPR)

Susunan Pemegang Saham BPR posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Komposisi Saham	
		Nominal	%
1	Mia Budy Setyagraha	1.502.800.000	50,09
2	Yudhistira	666.240.000	22,21

3	Hj. Raehana Fatimah	442.960.000	14,77
4	Kopkar PTP Nusantara X	388.000.000	12,93
Total		3.000.000.000	100,00

d. Wilayah Operasional

Jangkauan operasional BPR tersebar di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk Hingga akhir Desember 2025, BPR memiliki 1 Kantor Pusat di Pare, Kediri, dan 1 Kantor Cabang di Jombang Hingga saat ini, BPR telah melayani pasar regional dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis debitur dan klien yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan dan institusi.

e. Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jumlah rekening	Oustanding Per 31 Desember 2025
1	Penghimpunan Dana		
	a. Tabungan	5060	5.283.853.241
	b. Deposito	114	11.265.000.000
2	Penyaluran Dana		
	a. Kredit UMKM	1.015	23.777.913.203
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan	1.474	15.285.396.421

f. Keanggotaan Pada Asosiasi

Perusahaan terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	-

g. Perubahan yang bersifat signifikan

- Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
- Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR

D. PENJELASAN DIREKSI

1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

a. Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi BPR

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perusahaan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK No.51/ POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi BPR juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK No.51/ POJK.03/2017, menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

b. Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi BPR menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang kami jalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

c. Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2024. Sepanjang implementasi hingga tahun 2025, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi BPR mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.

d. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

1. Kinerja Aspek Ekonomi

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian
1	Total Aset	26,594,857,959	25,198,752,280	94.75
2	Total Tabungan	7,152,611,993	5,283,853,241	73.87
3	Total Deposito	11,186,000,000	11,265,000,000	100.71
4	Total KYD	22,424,469,228	21,974,236,134	97.99
5	Total Laba	310,199,408	6,818,195	2.20

2. Kinerja Aspek Sosial

- BPR telah memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kinerja Aspek Lingkungan

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas/operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (email/online chat group) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin

b. Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan

BPR memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan. Perusahaan mendukung para debitur untuk memiliki sertifikasi lingkungan, maupun sertifikasi bangunan berwawasan lingkungan

c. Strategi Pencapaian Target

1. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan terutama Bagian Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BPR akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- b. Perusahaan terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktifitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- c. Memakai dan menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2. Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3. Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR

Tahun 2025 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks dan percepatan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun seiring dengan hal tersebut, terdapat juga tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan dilewati oleh BPR. Menyadari hal ini, BPR tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang sudah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perseroan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perseroan dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 - Penerbitan Laporan Tahunan 2024 - Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2024 - Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan - Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024
Akuntabilitas	Perseroan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat job descriptions yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perseroan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi - Menerapkan check and balance system. - Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai Perseroan (corporate core values), sasaran usaha, dan strategi Perseroan - Memiliki sistem reward dan punishment.
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perseroan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu - Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) <p>Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku</p>

<p>Indepedensi</p>	<p>Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perseroan - Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan - Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
<p>Kewajaran</p>	<p>Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin</p>	<p>Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin</p>

- a. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Direksi	Pengarah/Pengambil Keputusan/Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

- b. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Bank dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat modul pelatihan Keuangan Berkelanjutan berbasis e-learning. Penyusunan e-learning ini melibatkan beragam pemangku kepentingan. Modul ini menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja Bank
 - Bank telah mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan
- c. Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.
- Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. BPR berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.
 - Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
 1. Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
 - Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana

- Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
 - Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. BPR telah melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
- Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.
 - Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan
- d. Pemangku kepentingan
- Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara BPR dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.
 - Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui, pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar
 - Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan
 - Keterlibatan Pemangku Kepentingan Para pemangku kepentingan memiliki peran yang signifikan dalam penerapan keuangan berkelanjutan pada BPR. Pemangku kepentingan mendapat perhatian yang penting karena mereka mempengaruhi jalannya operasional BPR atau terkena dampak dari kegiatan operasional BPR. Secara strategis, pemangku kepentingan turut mengembangkan dan memengaruhi kinerja BPR. Karena itu, kami senantiasa berusahamembangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.
 - Dalam upaya memahami kebutuhan para pemangku kepentingan, PT. BPR Bank

Toeloengredjo Dasa Nusantara melakukan pendekatan dengan metode sebagai berikut:

PEMANGKU KEPENTINGAN	METODE PENDEKATAN
Pemegang Saham	Melalui RUPS
Regulator (Pemerintah, Otoritas)	Kepatuhan Pelaporan sesuai dengan ketentuan
Pegawai	Pelatihan dan Pendidikan
Nasabah	Interview Kepuasan Nasabah
Mitra Bisnis (Akademisi, Praktisi, dsb)	Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
Masyarakat	Program CSR

- Melalui keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan, BPR dapat memastikan bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan dapat berjalan optimal, selaras dengan regulasi, serta memberikan manfaat bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan
- e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan
- Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
 - Melalui penerapan GCG, Perseroan berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lain. BPR meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan daya saing Perseroan dan menciptakan **nilai ekonomi yang berkelanjutan** bagi para pemangku kepentingan di tengah dinamika perubahan iklim usaha serta persaingan yang semakin ketat
 - Permasalahan yang dihadapi dari sisi internal:
 1. Fokus Bisnis Bank
BPR fokus pada perbaikan kualitas kredit dan kehati-hatian penyaluran kredit sehingga terdampak RAKB realisasi belum sesuai
 2. Operasional Bank
BPR dalam proses merger konsolidasi sesuai penerapan POJK no 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat, sehingga terfokus pada hal tersebut
 3. Kebijakan Internal
Secara kebijakan internal, BPR mendukung pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan. Namun perubahan BPR menuju merger konsolidasi membuat harus sinkronisasi kebijakan antar BPR pelaksana merger konsolidasi
 4. Keahlian SDM Bank
Pada beberapa posisi tertentu masih terdapat keahlian/pendidikan yang belum terpenuhi namun kami melakukan mitigasi dengan pendidikan dan pelatihan serta juga melakukan pemenuhan posisi sesuai keahlian dan pendidikan
 5. Lainnya

Pemenuhan SDM di bidang bisnis yang belum sesuai target karena kriteria tidak memenuhi

- Upaya yang dilakukan atas permasalahan internal diatas:
 1. Kami senantiasa mengembangkan bisnis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dan penghimpunan dana, begitu juga dalam penyelesaian kredit
 2. Kami selalu mendukung proses merger konsolidasi sesuai arahan pemegang saham pengendali
 3. Kami berupaya melakukan pemenuhan SDM dengan membuka lowongan kerja secara terbuka dengan tetap memperhatikan kriteria sesuai kebutuhan
- Permasalahan yang dihadapi dari sisi eksternal:
 1. Kebijakan Pemerintah
Pemberian KUR dengan suku bunga rendah, memberikan dampak dalam rencana dan penerapan bisnis BPR
 2. Perekonomian Nasional, Regional, Global
Kondisi geopolitik global yang berkejolak berpengaruh dalam bisnis BPR walaupun kurang signifikan
 3. Lainnya
Semakin bertambahnya dan beragamnya lembaga keuangan memberikan penambahan persaingan dalam bisnis keuangan. Namun BPR tetap optimis dalam menghadapi tantangan tersebut
- Upaya yang dilakukan atas permasalahan eksternal diatas:
 1. Kami berupaya memperhatikan kebutuhan nasabah dengan pendekatan personal dan menjadikannya sebagai mitra, dengan semboyan sukses bersama mitra sebagai kunci kami melangkah.
 2. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara tetap optimis, melihat kami dengan pengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun selalu bisa menjawab tantangan dengan baik, terbukti masih bisa bertahan sampai sekarang

F. KINERJA KEBERLANJUTAN

a. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR

- Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh pimpinan di Kantor Pusat, termasuk jajaran Direksi dan Komisaris. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan untuk Kepala Cabang, Manager Kantor Pusat, Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya keberlanjutan dan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, baik untuk seluruh karyawan, dan debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

b. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Total Aset	34,472,141,085	26,156,796,464	30,894,771,679	24,286,480,444	26,594,857,959	25,198,752,280
Total Tabungan	5,878,220,084	5,437,583,080	5,774,811,421	5,706,560,927	7,152,611,993	5,283,853,241
Total Deposito	16,078,116,105	12,335,500,000	12,740,500,000	10,346,000,000	11,186,000,000	11,265,000,000
Total KYD	21,568,044,543	17,625,129,367	19,138,668,145	18,404,469,228	22,424,469,228	21,974,236,134
Total Ekuitas	7,939,979,528	7,423,363,022	7,480,263,712	7,481,303,871	7,791,529,980	7,488,122,066
Laba Tahun berjalan	430,983,242	33,228,178	57,069,906	57,940,849	310,199,408	6,818,195

BPR mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Penyaluran kredit terbesar ada di segmen *Kredit UMKM*. Melalui penyaluran kredit, BPR turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

Pos	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Proyeksi 2026
Kredit UMKM	15.056.125.430	16.473.562.696	19.269.877.593
Kredit Lainnya	3.348.343.798	5.500.673.438	6.098.298.413
Total Kredit	18.404.469.228	21.974.236.134	25.368.176.606

c. Kinerja Sosial

1. Komitmen BPR

BPR berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan

peraturan ketenaga kerjaan. Dalam memberikan layanan jasa keuangan maupun memasarkan produk- produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas, Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

BPR berkomitmen untuk menjadi BPR yang bermanfaat bagi stakeholder maupun stockholder, dan dipercaya untuk melayani UKM dan Masyarakat khususnya di wilayah sekitar guna mendorong Perekonomian Daerah dan Berdampak Untuk Lingkungan Hidup di sekitar nya.

2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Pria	20	61 %
2	Karyawan Wanita	13	29 %
	Total Karyawan	33	100 %

No.	Jabatan	2023		2024		2025	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dewan Komisaris	1	0	1	0	1	0
2	Direksi	2	0	1	0	1	0
3	Pejabat Eksekutif	4	1	3	0	3	0
4	Pegawai Staf/Pelaksana	12	12	11	14	20	13
5	Pegawai Dasar	5	0	5	0	5	0
	Total	24	13	21	14	20	13

BPR memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan selalu mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan

antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.

3. Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi

keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di BPR, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau call center BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

d. Kinerja Lingkungan

Kantor pusat dan cabang yang dimiliki BPR berada di wilayah perkotaan. Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait Upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, BPR mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negative lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup

G. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan BPR Posisi 31 Desember 2025

H. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA

Belum terdapat umpan balik dari pembaca terkait Laporan Keberlanjutan BPR Posisi 31 Desember 2025

I. TANGGAPAN LJK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2025 adalah kedua kali dilaporkan oleh BPR sesuai ketentuan permodalan yang dipersyaratkan

Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025 sesuai Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kediri, 02 Maret 2026

Direksi

NYANIL ARIS SUPRAPTANA
Direktur



Dewan Komisaris



RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO
Komisaris